

Gudang Kembang Api Pusat Perbelanjaan Meledak di Armenia, 3 Tewas dan 60 Terluka

YEREVAN(IM) - Ledakan melanda gudang kembang api di sebuah pusat perbelanjaan di ibu kota Armenia Yerevan pada Minggu (14/8) malam. Peristiwa ini menewaskan tiga orang dan melukai lebih dari 60 orang.

Rekaman video menunjukkan asap abu-abu mengepul di atas sebuah bangunan dan orang-orang berlarian menjauh dari daerah itu. Petugas penyelamat melakukan pencarian dengan mengangkat logam bengkok dan puing-puing untuk menemukan korban selamat saat awan debu dan asap menggantung di udara.

Orang-orang di sekitar membantu para korban pindah ke tempat yang aman. Kementerian Kesehatan Armenia mengatakan 61 orang terluka, dengan beberapa dirawat di rumah sakit.

Kantor berita Rusia Interfax mengutip Kementerian Darurat Armenia, mengatakan, mayat korban ketiga telah ditemukan. Para pejabat sebelumnya melaporkan dua kematian atas peristiwa ledakan tersebut.

Menteri Darurat Armenia Armen Pambukhchyan yang dikutip oleh kantor berita Sputnik Senin (15/8) mengatakan, api telah dipadamkan, tetapi angin kencang masih menjadi ancaman. Dia menyatakan, tim penyelamat akan melanjutkan pencarian korban selamat sepanjang malam.

Kementerian Darurat mengatakan, penyelidikan awal menunjukkan dua ledakan besar merobohkan bagian dari gedung yang menampung kembang api. Namun tidak segera jelas apa yang menyebabkan kembang api meledak. ● **gul**



LOMBA MERAYAKAN HUT RI KE-77 DI KUALA LUMPUR

Anak-anak Indonesia dari Sanggar Bimbingan Kepong mengikuti lomba menuang air di Kompleks Olahraga International Islamic University Malaysia, Kuala Lumpur, Minggu (14/8). Panitia Kuliah Kerja Nyata Internasional Perguruan Tinggi Muhammadiyah bersama keluarga besar Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Malaysia mengadakan upacara dan lomba untuk merayakan HUT ke-77 Kemerdekaan RI di Kuala Lumpur.

Kehidupan Kaum Perempuan di Afghanistan Kian Memprihatinkan

Uni Eropa menegaskan, Afghanistan harus mematuhi perjanjian internasional.

BRUSSELS(IM) - Uni Eropa menyampaikan keprihatinan atas kondisi perempuan dan anak perempuan di Afghanistan. Hal itu disampaikan setelah Taliban melakukan tindakan represif terhadap sejumlah perempuan Afghanistan yang berpartisipasi dalam demonstrasi menuntut kebebasan dan pekerjaan.

“Uni Eropa sangat prihatin dengan nasib perempuan dan anak perempuan Afghanistan yang telah melihat kebebasan, hak, dan akses mereka ke layanan dasar seperti pendidikan ditolak secara sistematis,” ujar kantor kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip laman Al Arabiya Senin (15/8).

Uni Eropa menegaskan, Afghanistan harus mematuhi perjanjian internasional di mana ia menjadi negara pihak.

Afghanistan didesak melindungi hak-hak ekonomi, sosial, budaya, politik, serta menjamin perwakilan dan partisipasi setara bagi semua warganya. Perhimpunan Benua Biru pun menekankan bahwa Afghanistan tidak boleh menimbulkan ancaman bagi negara mana pun sesuai resolusi Dewan Keamanan PBB.

Pemerintahan Taliban telah mengumumkan akan menyusun kurikulum pendidikan khusus untuk kaum perempuan di Afghanistan. Terkait hal itu, Taliban telah membentuk sebuah badan bernama direktorat kurikulum akademik.

Juru bicara Kementerian Pendidikan Tinggi Taliban Ahmad Taqi mengungkapkan, direktorat tersebut bertugas meninjau dan mengembangkan kurikulum akademik di seluruh universitas di Afghani-

stan berdasarkan hukum Islam. “Kami membentuk komisi untuk meninjau kurikulum, mengundang perwakilan dan pakar dari universitas negeri serta swasta di seluruh negeri, menggelar sejumlah pertemuan dan mempertimbangkan kembali kurikulum,” kata Taqi, Minggu (14/8), dilaporkan laman Asian News International.

Berdasarkan laporan Khaama Press, direktorat kurikulum akademik bentuk Taliban akan memiliki enam direktur dan 52 pegawai atau staf.

Sejak berhasil menguasai kembali Afghanistan pada Agustus tahun lalu, Taliban sudah menghadapi desakan komunitas internasional untuk memenuhi hak-hak dasar perempuan di negara tersebut, termasuk di bidang pendidikan.

Taliban sempat berjanji akan menjamin dan memenuhi hak anak perempuan dan perempuan Afghanistan, tapi hingga kini mereka belum menunjukkannya.

Akhir bulan lalu, organisasi hak asasi manusia (HAM)

Amnesty International mengatakan, kehidupan perempuan dan anak perempuan di Afghanistan telah dihancurkan oleh kebijakan diskriminatif Taliban. Dalam laporannya yang dirilis 27 Juli lalu, Amnesty menyoroti tentang kebijakan Taliban melarang anak perempuan di Afghanistan bersekolah mulai dari kelas tujuh. Pembatasan akses terhadap perempuan untuk bekerja dan aturan pemakaian burka turut disorot.

Dalam laporan tersebut, Amnesty pun menuding Taliban menghancurkan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Taliban disebut turut berkontribusi pada lonjakan pernikahan anak di Afghanistan. Laporan Amnesty juga mendokumentasikan penyalakan dan pelecehan terhadap wanita yang ditangkap oleh Taliban karena memprotes kebijakan-kebijakan pembatasan itu.

“Secara keseluruhan, kebijakan-kebijakan ini membentuk sistem represi yang mendiskriminasi perempuan

dan anak perempuan di hampir setiap aspek kehidupan mereka. Tindakan keras yang menyakinkan terhadap populasi wanita Afghanistan ini meningkat dari hari ke hari,” kata Amnesty dalam laporannya.

Terkait peningkatan pernikahan anak, Amnesty mengungkapkan, hal itu dipengaruhi oleh krisis ekonomi dan kemanusiaan yang tengah melanda Afghanistan. Kurangnya prospek pendidikan dan pekerjaan bagi perempuan serta anak perempuan turut berperan dalam melonjaknya pernikahan anak.

Namun menurut Amnesty, mereka pun menemukan adanya perempuan dan anak perempuan yang dipaksa menikah dengan anggota Taliban. Tekanan kepada mereka muncul dari Taliban atau keluarganya sendiri. Laporan Amnesty dibuat oleh para peneliti mereka saat mengunjungi Afghanistan pada Maret lalu. Mereka mewawancarai 90 perempuan dan 11 anak perempuan dengan rentang usia antara 14-74 tahun di seluruh Afghanistan. ● **tom**

Skotlandia Negara Pertama Gratiskan Produk Menstruasi

EDINBURGH(IM) - Skotlandia akan menjadi negara pertama di dunia yang memperkenalkan undang-undang untuk melindungi hak atas produk menstruasi secara gratis. Aturan ini dituangkan dalam Undang-Undang Produk Menstruasi yang mulai berlaku pada Senin (15/8).

Dewan dan penyedia pendidikan di Skotlandia akan diwajibkan secara hukum untuk memastikan produk sanitasi gratis tersedia bagi siapa saja yang membutuhkannya. Undang-undang yang awalnya diusulkan oleh MSP Buruh Monica Lennon ini dengan suara bulat disetujui oleh Parlemen Skotlandia pada 2020. “Otoritas lokal dan organisasi mitra telah bekerja keras untuk membuat hak legal untuk mengakses produk menstruasi gratis menjadi kenyataan. Saya berterima kasih kepada mereka dan ribuan orang yang telah terlibat di seluruh negeri,” ujar Lennon dikutip dari SkyNews.

Lennon telah berkampanye untuk mengakhiri kerentanan produk sanitasi untuk menstruasi sejak 2016. Dia menggambarkan pengajuan aturan tersebut sebagai tindakan praktis dan progresif di dunia. “Ini adalah tonggak besar lainnya untuk kampanye martabat menstruasi dan gerakan akar rumput yang menunjukkan perbedaan yang dapat dibuat oleh pilihan politik yang progresif dan berani,” ujarnya.

“Ketika krisis biaya hidup mulai terjadi, Undang-Undang Produk Menstruasi adalah mercusuar harapan yang menunjukkan apa yang dapat dicapai ketika para politisi bersatu demi kebaikan orang-orang yang kami layani,” kata

Lennon.

Dewan Skotlandia akan memutuskan pengaturan pasti apa yang diterapkan, tetapi mereka akan memiliki kewajiban hukum untuk memberi siapa pun yang membutuhkannya akses ke berbagai produk menstruasi dengan cukup mudah. Saat ini tampun, pembalut, dan beberapa produk yang dapat digunakan kembali didanai di sekolah, perguruan tinggi, dan universitas di Skotlandia. Sejak 2017, sekitar 27 juta poundsterling telah dihabiskan untuk menyediakan akses ke fasilitas publik.

Menteri Keadilan Sosial Skotlandia Shona Robison mengatakan, menyediakan akses ke produk menstruasi gratis adalah dasar kesetaraan dan beberapa produk yang dapat digunakan kembali didanai di sekolah, perguruan tinggi, dan universitas kami,” ujarnya.

Menurut Robison, Skotlandia bangga menjadi pemerintah nasional pertama di dunia yang mengambil tindakan untuk menyediakan kebutuhan produk menstruasi gratis. Produk menstruasi gratis diluncurkan di semua sekolah dasar dan menengah di Inggris pada awal 2020. ● **gul**

Geng Kriminal Ekuador Ledakkan Pelabuhan Guayaquil, 5 Tewas dan 26 Luka

GUAYAQUIL(IM) - Menteri Dalam Negeri Patrick Carrillo menyatakan, ledakan mematikan di kota pelabuhan Guayaquil dilakukan oleh penjahat terorganisir. Sedikitnya lima orang meninggal dunia dan 26 lainnya luka-luka dalam ledakan pada Minggu (14/8).

Carrillo mengatakan, ledakan itu adalah deklarasi perang oleh geng-geng kriminal terhadap pemerintah. “Tentara bayaran kejahatan terorganisir, yang telah lama membus ekonomi, sekarang menyerang dengan bahan peledak,” ujarnya usai ledakan, dikutip dari BBC Senin (15/8).

“Ini adalah deklarasi perang terhadap negara,” tambahnya.

Negara yang termasuk dalam Komunitas Andes ini digunakan sebagai rute penyelundupan kokain dari negara tetangga Peru dan Kolombia. Ekuador telah mengalami peningkatan tajam dalam pembunuhan dan kejahatan terkait geng baru-baru ini.

Menurut Insight Crime, Guayaquil telah menduduki peringkat ke-50 kota paling kejam di dunia. Situs web jurnalisme investigasi melaporkan tingkat pembunuhan di Ekuador meningkat lebih cepat daripada negara lain di Amerika Latin atau Karibia pada 2021.

Keadaan darurat telah diumumkan di Guayaquil, kota terpadat di Ekuador dan pusat perdagangan penting. Ini adalah keadaan darurat keempat yang diumumkan di Ekuador sejak Oktober karena kekerasan geng.

Ledakan terbaru yang terjadi pada pagi hari itu, menurut Layanan Manajemen Risiko dan Darurat Nasional, membuat delapan rumah dan dua mobil hancur. Gambar dari tempat kejadian menunjukkan bagian depan rumah robek dan mobil berlumuran darah dengan jendla yang pecah.

Guayaquil telah mengalami tingkat kekerasan yang mengejutkan, termasuk mayat yang dipenggal tergantung di jembatan penyeberangan dan kerusakan penjara yang memisahkan antara geng-geng yang bersaing.

Hampir 400 narapidana meninggal dalam enam kerusuhan terpisah sejak Februari 2021.

Setelah ledakan, wali kota Cynthia Viteri menulis surat terbuka kepada Presiden Guillermo Lasso, yang mulai menjabat tahun lalu. “Geng kriminal telah menjadi pemerintahan di dalam pemerintahan di Ekuador,” ujar permulaan surat itu.

“Kami telah menyaksikan orang-orang digantung di jembatan, pembunuhan di atas sepeda motor, pemerkosaan di pusat perbelanjaan dan di bus sekolah. Apa lagi yang Anda ingin kami lakukan untuk membeli diri? Seorang Presiden adalah perlindungan rakyatnya, tetapi sejauh ini kami belum melihat satu langkah pun yang aman untuk memerangi kejahatan,” ujar Viteri.

Lasso mengatakan di akun Twitter, tidak akan membiarkan kejahatan terorganisir mencoba menjalankan negara. Namun dia telah menghadapi perjuangan berat dan kritik atas kurangnya perubahan yang berarti. ● **ans**



ADAT PERNIKAHAN KOSOVO

Melissa Guerrero, warga AS berdarah Meksiko, memakai riasan dan pakaian pernikahan tradisional, bersiap untuk upacara pernikahan di desa Donje Ljubinj, dekat Prizren, Kosovo, Jumat (5/8).

Bintang Film Porno Rusia Ditemukan Tewas Terbunuh di Kamar Mandi

ST PETERSBURG Khamlovskaya.

Namun motif pembunuhan ini belum diungkap polisi. Anastasia—yang memiliki banyak pengikut di Tik Tok dan memiliki karier kedua sebagai seniman tato—ditemukan tewas di kamar mandinya satu minggu setelah dia terakhir kali terlihat. Para penggemar Anastasia membanjiri posting terakhirnya di platform media sosial dengan pesan belasungkawa. “Tsirahatlah dengan tenang,” bunyi salah satu komentar, seperti dikutip The Sun, Senin (15/8). “Perasaan yang aneh ketika kamu melihat seseorang dan menyadari bahwa dia tidak ada lagi,” imbuh komentar lainnya.

Menurut sumber polisi, ada enam luka tikaman di tubuhnya. Anastasia dikenal di situs dewasa dengan nama “grshmn” dan kontennya dilihat jutaan kali. Sedangkan Chernyшов dilaporkan pernah bermasalah dengan hukum sebelumnya atas kasus pencurian dan penghindaran dinas militer. ● **gul**



FESTIVAL FILM INTERNASIONAL BEIJING KE-12

Anggota juri Tiantan Award Li Xuejian (tengah), Guo Fan (kiri ke-1), Malcolm Clarke (kedua dari kiri), Qin Hailu (kedua dari kanan) dan Wu Jing berpose untuk foto bersama di karpet merah Festival Film Internasional Beijing ke-12 di Beijing, Tiongkok, Jumat (12/8).